

## Hasil Penelitian

# HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH

## *(THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INCOME INEQUALITY IN CENTRAL JAVA)*

*Rizqi Haedzar Pradana\**, *Sri Yani Kusumastuti\**, *Samuel Fery Purba\*\**,  
*Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang\*\**

\*Universitas Trisakti  
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat  
DKI Jakarta - Indonesia  
Email: sriyani.k@trisakti.ac.id

\*\*Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Widya Graha Lt. 4, Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 10, Jakarta  
DKI Jakarta – Indonesia

*Diterima: 11 Mei 2023; Direvisi: 20 Desember 2023; Disetujui: 26 Februari 2024*

### ABSTRAK

Jawa Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa dan posisi ketiga tertinggi kontribusi dalam perekonomian nasional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin merata. Tahun 2004-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas 5%, tetapi ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengkaji hubungan timbal balik pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Data sekunder penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode penelitian menggunakan model persamaan simultan *Two-Stage Least Square* (2SLS) dengan jangka waktu tahun 2002-2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Di sisi lain, upah minimum provinsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Tetapi konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dapat mengalokasikan dan merealisasikan dana perimbangan sesuai dengan tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu pemerataan pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat, bukan terfokus belanja operasional pemerintahan dan belanja pegawai. Di samping itu, pemerintah daerah harus menjaga stabilisasi harga sandang dan pangan, pemberian dana bantuan sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat langsung ke masyarakat miskin, serta membuka peluang lapangan kerja dan pemberian kredit mikro yang sesuai bagi petani dan nelayan di Jawa Tengah.

**Kata kunci:** 2SLS, Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi

### ABSTRACT

*Central Java is the third-largest province in Java and makes the third-highest contribution to the national economy. This situation is a challenge for Central Java in terms of achieving more equal regional development. In 2004–2019, Central Java's economic growth was above 5%, but income inequality has also increased. The study's goal is to identify and examine the reciprocal relationship (simultaneous) between economic growth and income inequality in Central Java. Secondary research data were obtained from the BPS-Statistics Indonesia, the Investment Coordinating Board, and the Directorate General of Fiscal Balance. The research method uses a*

*simultaneous equation model with Two-Stage Least Squares (2SLS) with a period of 2002–2020. This study's findings reveal only a one-way relationship, meaning that economic growth has a significant effect on reducing income inequality. In addition, investment has no significant effect on economic growth, while local own-source revenue has a significant effect on economic growth in Central Java. The provincial minimum wage and human development index have a significant effect on reducing income inequality. But government consumption has no effect on reducing income inequality in Central Java. Regional governments in Central Java can allocate and actualize fiscal balance funds in line with the main objective of fiscal decentralization, which is to equalize national development and increase community welfare, not focus on government operational and personnel spending. In addition, the local government must maintain the stability of food and clothing prices, provide social assistance funds, Smart Indonesia Cards, and Healthy Indonesia Cards directly to the poor, as well as open employment opportunities and provide suitable microcredit for farmers and fishermen in Central Java.*

**Keywords:** 2SLS, Human Development Index, income inequality, Local Own-source Revenue, economic growth

## PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi di beberapa negara berkembang, memberikan harapan bagi negara tersebut keluar dari zona kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga permasalahan kemiskinan dapat tertangani. Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki pemerintahan daerah untuk melaksanakan aktivitas perekonomian di suatu daerah. Beberapa tahun terakhir, perekonomian di seluruh provinsi ditingkatkan dengan investasi dari dalam dan luar negeri. Harapannya investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada sisi lain, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu komponen desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi dan meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat. PAD dimanfaatkan untuk dapat mewujudkan visi dan misi di daerah dan meningkatkan pemerataan ekonomi dan menyerahkannya masyarakat. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2022a) kontribusi perekonomian di Indonesia berada di Pulau Jawa. Pada 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat sebesar 23,17% memberikan persentase tertinggi pada perekonomian nasional, selanjutnya Jawa Timur sebesar 19,0% dan Jawa Tengah sebesar 12,31%.

Angka kemiskinan yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mampu menurunkan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan di daerah. Teori Kuznet menerangkan hubungan mendasar antara perekonomian dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat, kemudian berangsur-angsur berkurang (Todaro dan Smith 2012). Tetapi kondisi tersebut berbeda, menurut Yumna et al. (2017) pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut terbukti ketika krisis keuangan Asia dalam 3 dekade terakhir, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi indeks gini berada pada posisi stabil, tetapi setelah masa krisis ekonomi mengalami pemulihan dengan cepat dan diikuti peningkatan yang tajam indeks gini (Yumna dkk. 2017). Kondisi ini dialami oleh beberapa negara, bahwa ketimpangan pendapatannya semakin resistan terhadap peningkatan ekonomi. Secara umum angka kemiskinan yang menurun, namun pendapatan semakin meningkat pada masyarakat kelas menengah atas dibandingkan kenaikan pendapatan pada masyarakat kelas menengah bawah dan masyarakat miskin.

Jawa Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah 34.337 km<sup>2</sup>, memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin merata. Menurut The World Bank (2015), ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena pekerjaan yang tidak merata, ketimpangan peluang, ketahanan ekonomi rendah, dan tingginya konsentrasi kekayaan. Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, kekayaan dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mampu menjelaskan sebab ketimpangan pendapatan di daerah.

Tingkat kekayaan masyarakat dapat menentukan kualitas pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja, sehingga nantinya akan mempengaruhi kondisi status pekerjaan dan kesempatan kerja. The World Bank (2015) menerangkan bahwa separuh dari kekayaan negara di Indonesia dimiliki oleh 1% masyarakat Indonesia, maka sebanyak 2,7 juta orang menguasai kekayaan negara sebesar 70%, sisanya 30% diperebutkan masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat miskin. Pendekatan dalam mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini dan Kurva Lorenz (Todaro dan Smith 2012).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki indeks gini yang selalu

meningkat setiap tahunnya, tetapi tahun 2013-2017 indeks gini mengalami penurunan dari 0,395 menjadi 0,365. Jawa Tengah selaku provinsi dengan kontributor ekonomi ketiga tertinggi di Indonesia mencatat pembangunan daerah yang relatif sama. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, nilainya berada pada kisaran 5 persen dari tahun 2004-2019. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang baik belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatannya (Gambar 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa perlu melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

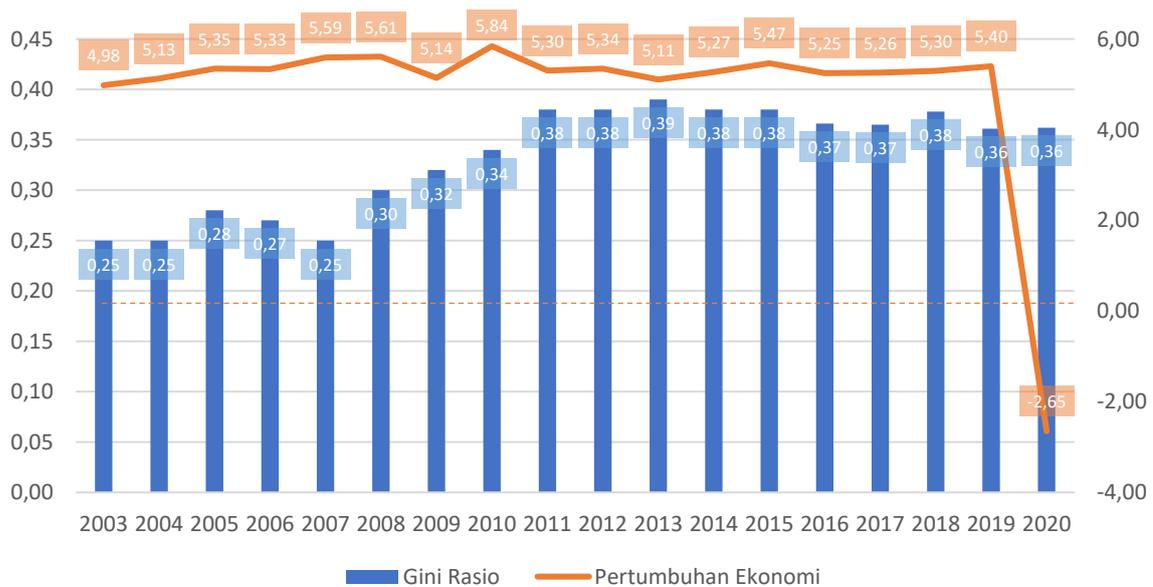
Menurut Rahmadi dan Parmadi (2019) dan Kunenengan et al. (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh dalam penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. Penurunan ketimpangan juga memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian dividen dalam pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan (Ifeakachukwu 2020).

Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kebijakan investasi yang tepat sasaran, sehingga nantinya akan saling mempengaruhi secara signifikan (Astuti 2018; Diannita dan Wenagama 2022; Fattah dkk. 2022). Selain itu, pengaruh PAD memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (Rori dkk. 2016; Palguno dkk. 2020; Diannita dan Wenagama 2022). PAD dapat membantu tingkat kemandirian suatu daerah dalam menrencanakan dan mengelola keuangan

daerah dengan efektif dan efisien serta berdampak pada perekonomian di daerah.

Upah minimum provinsi (UMP) di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang semakin menurun (Anshari dkk. 2018; Fanshuri dan Saputra 2022; Sulistyaningrum dkk. 2022). UMP menjadi acuan penghasilan minimal yang diperoleh masyarakat di daerah sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan (Samara dkk. 2019; Zusanti dkk. 2020; Yoertiara dan Feriyanto 2022). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kehidupan yang layak dan berkualitas. Di sisi lain, konsumsi pemerintah harus mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah (Fattah dkk. 2022; Walujadi dkk. 2022).

Uraian latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut, diperoleh beberapa perbedaan temuan penelitian terdahulu (*gap research*) yang menerangkan bahwa pengaruh beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi belum mampu menurunkan beberapa indikator ketimpangan pendapatan (Danawati dkk. 2016; Hellen dkk. 2017; Samara dkk. 2019; Saidi dkk. 2023). Hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi (Investasi dan PAD) dan ketimpangan pendapatan (UMP, IPM, dan konsumsi pemerintah) masih relatif belum banyak dianalisis secara bersamaan.



**Gambar 1.** Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini di Jawa Tengah Tahun 2003-2020  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2022a & 2022b)

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, seperti variabel endogen dan eksogen, jangka waktu dari tahun 2002-2020, metode dan judul penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis indikator pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ketimpangan pendapatan serta menganalisis hubungan saling mempengaruhi di antara PDRB dan Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam membuat kebijakan peningkatan perekonomian dan penurunan ketimpangan pendapatan, sehingga pembangunan daerah semakin merata dan masyarakat semakin sejahtera.

**METODE**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2002-2020. Penelitian dilakukan untuk mengkaji pengaruh timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Data pertumbuhan ekonomi terdiri dari ketimpangan pendapatan, INV serta PAD, sedangkan data ketimpangan pendapatan meliputi PDRB, IPM, UMP, dan Konsumsi Pemerintah. Definisi operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Data dikaji dengan regresi model persamaan simultan atau sering disebut *Simultaneous Equations Model* (SEM). SEM

merupakan regresi yang mengkaji hubungan timbal balik antara variabel A dan B (Gujarati et al., 2017). Syarat terjadinya model ini adalah persamaan A dijelaskan oleh B, dan secara paralel persamaan B dijelaskan oleh A. variabel A dan B karena keterkaitannya disebut variabel endogen. Sedangkan variabel lain diluar model disebut variabel eksogen (Gujarati et al., 2017). Persamaan simultan penelitian ini, sebagai berikut:

$$PDRB_t = \alpha_0 + \beta_1 Gini + \beta_2 INV + \beta_3 PAD_t + e_t \dots\dots (1)$$

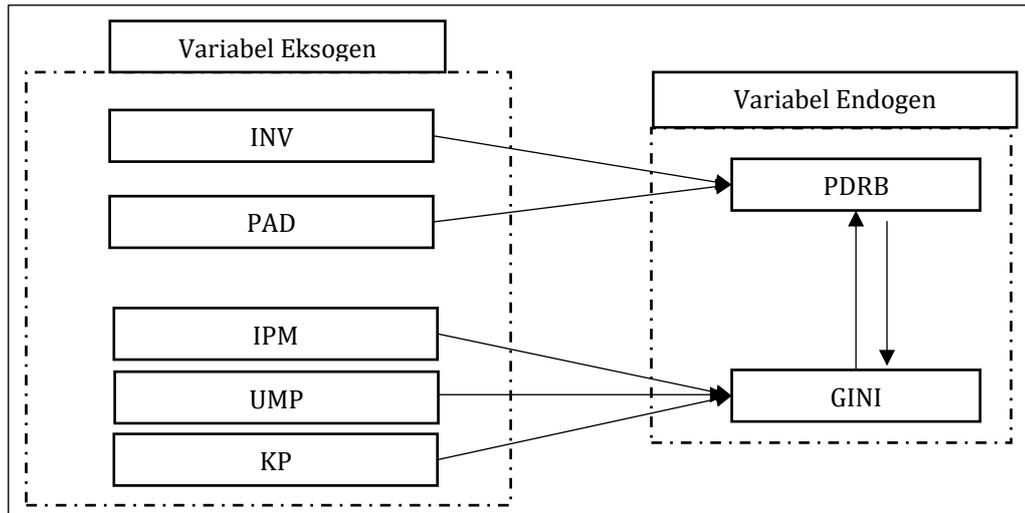
$$GINI_t = \alpha_0 + \beta_4 PDRB_t - \beta_5 IPM_t - \beta_6 UMP_t - \beta_7 KP_t + e_t \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots (2)$$

Keterangan persamaan di atas, yaitu  $\alpha$ : konstanta,  $\beta_1$ - $\beta_8$ : koefisien, PDRB: nilai PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi, GINI: indeks gini, INV: Total investasi dalam negeri dan luar negeri, PAD: pendapatan asli daerah, IPM: indeks pembangunan manusia, UMP: upah minimum provinsi, KP: konsumsi pemerintah, E: residual, dan t: Jangka waktu (2002-2020).

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan *Two Stage Least Square* (2SLS). Menurut Gujarati et al. (2017) bahwa model ini dimanfaatkan untuk menjernihkan variabel endogen terhadap gangguan stokastik. Tujuannya untuk menjalankan regresi model dalam bentuk tereduksi, yaitu regresi antara variabel endogen dengan seluruh variabel yang telah ditentukan sebelumnya, guna memperoleh nilai variabel endogen yang sudah diestimasi dari regresi variabel endogen terhadap variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
<b>Variabel Endogen</b>		
• Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	PDRB Jawa Tengah berdasarkan harga konstan (Proksi pertumbuhan ekonomi)	Rupiah
• Ketimpangan Pendapatan (GINI)	Kondisi distribusi pendapatan di daerah (Indeks Gini merupakan proksi ketimpangan pendapatan)	Skala 0-1
<b>Variabel Eksogen</b>		
• Investasi (INV)	Realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri di Jawa Tengah	Rupiah
• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang dihimpun oleh Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	Rupiah
• Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ketetapan penghasilan minimum yang diterima oleh masyarakat pekerja di provinsi	Rupiah
• Indeks pembangunan Manusia (IPM)	Kondisi sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomiannya	Indeks
• Konsumsi Pemerintah (KP)	Belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah.	Rupiah



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran Penelitian

Model simultan tersebut dilakukan proses uji pembuktian simultanitas dengan uji Hausman (Gujarati dkk. 2017). Uji tersebut untuk memastikan apakah terdapat masalah simultanitas. Permasalahan simultanitas disebabkan variabel endogen yang berhubungan dengan error. Apabila variabel endogen berhubungan dengan variabel error, maka hasil regresi akan menjadi bias. Nilai probabilitas variabel dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) dibandingkan dalam pengujian ini. Selain itu, variabel yang tidak mempunyai pengaruh endogen, dilakukan pengujian Eksogen. Uji ini berfungsi untuk memastikan variabel di persamaan sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dan kriteria variabel endogennya. Pengujian pembatasan identifikasi adalah menguji dua kondisi berbeda secara bersamaan, nilai probability dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Uji asumsi klasik dipergunakan untuk melihat model persamaan tidak terjadi penyimpangan statistik (Ghozali 2016). Uji normalitas untuk mendeteksi tingkat kenormalan distribusi pada nilai residual dan nilai Jarquerre Beta ( $\alpha = 5\%$ ). Selanjutnya, uji heteroskedastisitas untuk melihat model penelitian terjadi perbedaan varian dari residual di antara variabel pengamatan. Uji tersebut menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey, nilai probabilitas 5% (tingkat kesalahan). Uji Autokorelasi berguna untuk mengetahui kesalahan pengganggu data dari periode penelitian, menggunakan Breusch-Godfrey dengan nilai probabilitas  $\alpha (5\%)$ .

Pengujian hipotesis model yang terbantu dengan 3 uji, yaitu uji F-statistik, uji t-statistik, dan koefisien determinasi (Ghozali 2016). Uji F-Statistik untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan ketentuan melihat nilai probabilitas pada

posisi 5%. Uji t-statistik berfungsi menguji hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel independent pada posisi 5%. Sedangkan koefisien determinasi melihat kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independent.

Gambar 2 menjelaskan kerangka pemikiran penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, terdapat beberapa hipotesis penelitian yaitu:

- H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan ketimpangan pendapatan
- H2 : Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan pertumbuhan ekonomi
- H3 : Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H4 : PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H5 : UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- H6 : IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- H7 : Konsumsi pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil.** Proses identifikasi dilakukan melalui kondisi *order* (Gujarati dkk. 2017). Tabel 2 menunjukkan hasil identifikasi kedua persamaan merupakan *overidentified* (nilai  $K-k > m-1$ ), metode 2SLS menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada uji Simultanitas diperoleh nilai probabilitas PDRB sebesar 0,247 ( $> 5\%$ ), artinya PDRB tidak terdapat masalah endogenitas dan tidak berkorelasi dengan indeks gini. Di sisi lain, probabilitas indeks gini senilai 0,0286 ( $< 5\%$ ), berarti indeks gini memiliki

masalah endogenitas dan berkorelasi dengan PDRB. Pada uji Eksogen, PDRB memiliki nilai Basman chi<sup>2</sup> sebesar 0,6875 (> 5%), artinya variabel Investasi dan PAD menjadi variabel yang valid. Selanjutnya indeks gini memiliki nilai Basman chi<sup>2</sup> sebesar 0,0073 (< 5%), berarti variabel PDRB, IPM, UMP, dan KP menjadi variabel yang tidak valid atau model strukturalnya belum menspesifikasi indeks gini dengan benar.

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas uji normalitas pada kedua persamaan lebih besar dari 5%, sehingga persamaan tersebut terdistribusi dengan normal. Pada uji heterokedastisitas, nilai Prob. Chi-Square persamaan 1 dan 2 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , artinya data bersifat homoskedastisitas. Uji autokorelasi, persamaan 1 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0041 (< 5%), dikonklusikan terjadi masalah autokorelasi. Di sisi lain, persamaan 2 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6850 (> 5%), berarti kesalahan pengganggu antar-waktunya tidak berhubungan, atau tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 3 menyajikan hasil uji asumsi klasik. Berdasarkan metode 2SLS diperoleh nilai probabilitas persamaan 1 sebesar 0,0000 (< 5%), maka H<sub>0</sub> ditolak. Dikonklusikan variabel eksogen secara simultan signifikan mempengaruhi variabel endogen. Persamaan 2 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< 5%), maka H<sub>0</sub>

ditolak. Variabel eksogen persamaan 2 secara simultan signifikan mempengaruhi variabel endogen. Pada persamaan 1 diperoleh nilai koefisien determinasi 98,24%. Hal ini berarti variabel endogen (PDRB) dapat dijelaskan dalam variabel eksogen senilai 98,24%, sisanya 1,76% dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai koefisien determinasi persamaan 2 sebesar 89,11%. Dikonklusikan variabel eksogen pada persamaan 2 mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 89,11%, sisanya 10,89% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil estimasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4. koefisien indeks gini sebesar -0,4251 dan taraf signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0299 (< 5%), maka H<sub>1</sub> diterima. Kondisi ini menandakan bahwa ketimpangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan 1, investasi memiliki koefisien senilai 0,0081, sedangkan taraf signifikansi diperoleh nilai sebesar 0,6794 (> 5%), maka H<sub>3</sub> tidak diterima. Dikonklusikan investasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD pada Tabel 4 memperoleh nilai koefisien sebesar 0,4183 dan nilai probabilitas pada taraf signifikansi sebesar 0,0000, maka H<sub>4</sub> diterima. Hasil dan hipotesis penelitian sesuai, menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB.

**Tabel 2.** Hasil Uji Kondisi Order, Endogen dan Eksogen

Persamaan	Kondisi Order					Keterangan
	K	k	K-k	M	m-1	
PDRB	5	2	3	2	1	
Indeks Gini	5	3	2	2	1	Overidentified

Uji Simultanitas (Uji Endogen)			
PDRB → Gini		Gini → PDRB	
PDRB (V. Endogen)		Gini (V. Endogen)	
Durbin chi2(1)	= 1.96348 (p = 0.1611)	Durbin chi2(1)	= 5.66711 (p = 0.0173)
Wu-Hausman	= 1.49826 ( <b>p = 0.2427</b> )	Wu-Hausman	= 5.95066 ( <b>p = 0.0286</b> )

Uji Eksogen			
PDRB (V. Endogen)		GINI (V. Endogen)	
Sargan chi2	.23352 (p = 0.6289)	Sargan chi2	8.18985 (p = 0.0167)
Basman chi2	.161765 ( <b>p = 0.6875</b> )	Basman chi2	9.84889 ( <b>p = 0.0073</b> )

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	PDRB (V. Endogen)		GINI (V. Endogen)	
Uji Normalitas	Jarque-Bera	1.4067	Jarque-Bera	1.2942
	Probabilitas	<b>0.4949</b>	Probabilitas	<b>0.5236</b>
Uji Heteroskedastisitas	F-statistik	1.6654	F-statistik	0.1636
	Obs*R <sup>2</sup>	4.7472	Obs*R <sup>2</sup>	0.8483
	Probabilitas Chi <sup>2</sup> (3)	<b>0.1913</b>	Probabilitas Chi <sup>2</sup> (3)	<b>0.9319</b>
Uji Autokorelasi	Obs*R <sup>2</sup>	8.2176	Obs*R <sup>2</sup>	0.1646
	Probabilitas Chi <sup>2</sup> (1)	<b>0.0041</b>	Probabilitas Chi <sup>2</sup> (1)	<b>0.6850</b>

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Penelitian dengan Metode 2SLS

<b>Persamaan 1: PDRB (V. Endogen)</b>				
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>t-statistik</b>	<b>Sig.t</b>	<b>Keterangan</b>
GINI	-0.4251	-2.3994	0.0299	H1 diterima
INV	0.0081	0.4214	0.6794	H3 tidak diterima
PAD	0.4183	6.9483	0.0000	H4 diterima
R <sup>2</sup>		0.9853		
R <sup>2</sup> yang disesuaikan		0.9824		
F-Statistik		337.5920		
Probabilitas F		0.0000		
<b>Persamaan 2: GINI (V. Endogen)</b>				
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>t-statistik</b>	<b>Sig.t</b>	<b>Keterangan</b>
PDRB	2.3765	3.4884	0.0036	H2 tidak diterima
UMP	-0.7226	-2.5600	0.0227	H5 diterima
IPM	-4.9910	-2.5832	0.0217	H6 diterima
KP	0.4481	2.1621	0.0484	H7 tidak diterima
R <sup>2</sup>		0.9153		
R <sup>2</sup> yang disesuaikan		0.8911		
F-Statistik		38.1398		
Probabilitas F		0.0000		

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Pada persamaan 2 diperoleh nilai koefisien dan taraf signifikansi yang berbeda pada hipotesis. PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi, memiliki koefisien senilai 2.3765 dan nilai probabilitas sebesar 0,0036 (< 5%), maka H2 tidak diterima. Disimpulkan bahwa PDRB belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, koefisien UMP sebesar -0,7226 dan nilai taraf signifikansi sebesar 0,0227 (< 5%), maka H5 diterima.

Hasil ini menginformasikan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini. IPM diperoleh nilai koefisien sebesar -4,9910 dan taraf signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0217 (< 5%), maka H6 diterima. Temuan ini menyatakan bahwa secara parsial, IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini. Terakhir, KP memiliki koefisien senilai 0,4481 dan pada taraf signifikansi nilai probabilitas sebesar 0,0484 (< 5%), maka H7 tidak diterima. Hasil KP pada penelitian ini menunjukkan pengaruh yang negatif tapi tidak signifikan terhadap indeks gini.

**Pembahasan.** Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dihipotesiskan saling mempengaruhi. Metode persamaan simultan dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesis tersebut. Korelasi yang terjadi diantara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yaitu hanya hubungan searah dimana PDRB mempengaruhi indeks gini, sedangkan indeks gini tidak mempengaruhi PDRB. Perbedaan hasil pada hubungan indeks gini terhadap PDRB dianggap bias karena adanya

permasalahan simultanitas, sehingga hasil tersebut dapat diabaikan.

Hasil penelitian menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Peningkatan PDRB di Jawa Tengah dapat pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat daerah, sehingga mampu menyejahterahkan masyarakat. Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori dan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Rahmadi dan Parmadi 2019; Kunenengan dkk. 2023).

Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah mampu membuat program kerja pembangunan daerah yang dapat langsung berdampak positif terhadap masyarakat. Peningkatan perekonomian dalam berbagai sektor di masyarakat dimanfaatkan untuk peningkatan penghasilan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan kebijakan penurunan ketidakmerataan tersebut nantinya dapat meningkatkan pemerataan kesehatan, pendidikan, peluang kerja dan pendapatan.

Menurut Domonkos (2020) bahwa peningkatan perekonomian dapat menurunkan indeks gini, mengindikasikan adanya penyusutan masyarakat kelas menengah, selain itu semakin membaiknya supremasi hukum dan kualitas pendidikan yang semakin berkualitas. Ifeakachukwu (2020) menambahkan bahwa adanya dividen dalam pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan.

Meningkatnya ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya di kelompok rentan pada saat terjadi inflasi kenaikan harga sembako dan bahan bakar energi. Daya beli yang rendah akan menghambat perekonomian di sektor riil. Implikasinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan dapat terhambat. Untuk itu perlu didorong kebijakan inklusif dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi baik dalam dan luar negeri belum memberikan pengaruh yang signifikan di Jawa Tengah. Semakin tinggi investasi, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Astuti (2018), Diannita & Wenagama (2022), dan Fattah et al. (2022) yang menerangkan bahwa investasi memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Di sisi lain, temuan penelitian ini sejalan dengan Hellen et al. (2017) bahwa investasi belum memberikan pengaruh terhadap PDRB. Saidi et al. (2023) menambahkan bahwa penanaman modal asing (PMA) mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi investasi PMA di negara-negara berkembang tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi baik dari dalam dan luar negeri dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek hingga menengah belum dapat dirasakan secara langsung masyarakat. Nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah diharapkan dapat membuat program kerja daerah yang tidak hanya untuk pembangunan fisik infrastruktur, tetapi pembangunan manusia melalui peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan dana perimbangan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat dikombinasikan dengan Investasi sehingga menghasilkan program yang dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ifeakachukwu (2020) menyimpulkan bahwa PMA yang diperoleh pemerintah harus langsung disalurkan untuk membedakan masyarakat miskin.

PAD di Jawa Tengah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi di daerah (Rori dkk. 2016; Palguno dkk. 2020; Diannita dan Wenagama 2022). Daerah-daerah di Jawa Tengah telah mampu mengelola PAD dengan efektif dan efisien serta memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. PAD digunakan untuk

penyelenggaraan dan pelayanan publik di berbagai sektor untuk mendongkrak ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Tengah (2022) realisasi PAD di Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 55,18% dari total penerimaan provinsi. Presentase PAD yang tinggi disebabkan oleh realisasi pajak daerah yang tepat sasaran mencapai 79,73% dari PAD tahun 2021. Semakin tingginya PAD di daerah juga memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan manusia di daerah (Sembiring 2020).

UMP dan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh yang negatif signifikan, artinya semakin tinggi UMP di daerah maka tingkat ketimpangan semakin menurun. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Anshari dkk. (2018), Fanshuri dan Saputra (2022), dan Sulistyaningrum dkk. (2022) bahwa upah minimum di daerah dapat berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. UMP yang diterima masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akhirnya memeratakan pendapatan di daerah. Pemerintah Daerah dan Dinas Ketenagakerjaan di Jawa Tengah telah mampu menyusun program yang tepat sasaran sehingga penghasilan yang diterima masyarakat angkatan kerja dapat menurunkan indeks gini.

Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa IPM memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini memberitahukan bahwa semakin tinggi pembangunan manusia maka ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah semakin menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Samara dkk. 2019; Zusanti dkk. 2020; Yoertiara dan Feriyanto 2022) bahwa IPM memberikan pengaruh terhadap penurunan indeks gini di daerah. Pembangunan manusia dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah. Penurunan indeks gini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mampu menurunkan kemiskinan masyarakat di daerah (Yolanda dkk. 2020).

Pemerintah Jawa Tengah telah mampu meningkatkan pembangunan manusia di berbagai daerah dalam sektor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Program kerja daerah telah langsung memberikan dampak terhadap distribusi pendapatan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan gini ratio antara pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur (Chen dkk. 2019). Nugraha et al. (2020) menambahkan bahwa pemerintah mendorong investasi infrastruktur

untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan menurunkan gini ratio.

Konsumsi pemerintah belum memberikan pengaruh negatif terhadap indeks gini di Jawa Tengah. Artinya kenaikan konsumsi pemerintah dalam menjalankan program kerja, dapat meningkatkan indeks gini di daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fattah et al. (2022) dan Walujadi et al. (2022) bahwa konsumsi atau pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, temuan ini sejalan dengan penelitian (Danawati dkk. 2016; Samara dkk. 2019) bahwa konsumsi pemerintah belum memberikan pengaruh terhadap penurunan indeks gini. Pemerintah Daerah Jawa Tengah belum memberikan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dalam sektor konsumsi pemerintah untuk penurunan ketimpangan pendapatan di daerah.

Fokus kebijakan konsumsi pemerintah di Jawa Tengah, yaitu belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan (ASN dan Honorer), belanja operasional, belanja jasa, dan kepentingan pelaksana pemerintah lainnya. Seharusnya konsumsi pemerintah dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan belanja modal, seperti: peneyelenggaraan dan pelayanan publik di sektor pendidikan, pekerjaan umum, dan kesehatan, sehingga diharapkan ketimpangan pendapatan semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Chen dkk. (2019) menerangkan bahwa upaya menurunkan indeks gini di pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur. Pemerintah Daerah Jawa Tengah harus mampu membuat kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan menitikberatkan pada belanja modal dan infrastruktur di daerah-daerah Jawa Tengah.

## KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan hanya korelasi yang searah, PDRB memberikan pengaruh terhadap indeks gini, sedangkan indeks gini tidak berpengaruh terhadap PDRB. Kondisi ini terjadi karena adanya permasalahan simultanitas, sehingga dapat diabaikan. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Investasi baik dalam dan luar negeri belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan penanaman modal dalam dan luar negeri tidak hanya berfokus pada investasi di bidang infrastruktur, tetapi harus terbagi dalam peningkatan sumber daya manusia di daerah. PAD di Jawa Tengah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi, hal ini

dikarenakan pengelolaan PAD telah tepat sasaran pembangunan ekonomi daerah. UMP dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Peningkatan UMP dan IPM dapat pemeratakan distribusi pendapatan di daerah. Terakhir, konsumsi pemerintah di Jawa Tengah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat membuat formulasi kebijakan yang tepat dalam menyusun anggaran dan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk konsumsi belanja operasional kantor pemerintahan. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam menyusun formulasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan ketimpangan di daerah. Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik jumlah kajian antar variabel, periode analisis penelitian tahun 2002-2020, dan metode analisis penelitian.

## REKOMENDASI

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat menyusun dan merealisasikan dana perimbangan terutama alokasi dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH) dengan tepat sasaran, efektif dan efisien. Konsumsi pemerintah berdasarkan dana tersebut dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan tidak mengutamakan kepentingan pihak golongan tertentu. Alokasi DAU dan DBH tidak dimanfaatkan untuk belanja operasional pemerintahan dan belanja pegawai, tetapi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Peningkatan pelayanan publik diharapkan menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas, sehingga program ketenagakerjaan di daerah dapat terserap dengan baik.
2. Penurunan kemiskinan di daerah dapat dilakukan dengan pemerataan dan stabilisasi harga sandang dan pangan, sehingga masyarakat kelas menengah kebawah dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, pemberian subsidi silang berupa program dana bantuan sosial, pemberian Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat yang tepat sasaran mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk

memeratakan pendapatan di masyarakat. Dana tersebut mampu dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, menjangkau anak-anak usia sekolah untuk bersekolah gratis dan masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan yang layak.

3. Pemerintah Daerah dan Perusahaan di Jawa Tengah dapat menyusun program untuk membuka peluang pekerjaan. Dana alokasi khusus nonfisik dapat dimanfaatkan untuk mengadakan kursus, magang, dan sertifikasi keahlian bagi masyarakat angkatan kerja. Di sisi lain, investasi dari dalam dan luar negeri dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja, dan bukan hanya untuk infrastruktur fisik di daerah.
4. Pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah harus didasarkan pada program perencanaan nasional oleh pemerintah pusat. Infrastruktur yang dibangun harus diutamakan untuk langsung dimanfaatkan oleh masyarakat daerah, antara lain: infrastruktur sektor kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum.
5. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan dapat diberikan kredit usaha mikro yang sesuai dan tidak tinggi bunga kreditnya, pemerintah daerah diharapkan bekerjasama dengan Bank BUMN, BUMD, dan BUMDes menyusun program tersebut. Selain itu, pengembangan destinasi wisata di daerah-daerah pedesaan melalui dana desa dapat dioptimalkan sehingga ketimpangan pendapatan di pedesaan dapat diperkecil. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pinggir, tertinggal dan hutan, pemerintah menyusun program perhutanan sosial, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan untuk peningkatan potensi lokal di daerah.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada FEB Universitas Trisakti dan PR EPS BRIN, sebagai wadah untuk belajar dan mendapatkan ilmu selama perkuliahan serta untuk meningkatkan kapasitas diri menjadi peneliti yang terbaik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anshari, M., Azhar, Z. dan Ariusni. 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia. *EcoGen* 1(3), hlm. 494-502.

Astuti, P.W. 2018. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33

Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6(2), hlm. 1-11.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022a. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> [Diakses: 3 April 2023].

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022b. *Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/subject/157/produk-domestik-regional-bruto--kabupaten-kota-.html#subjekViewTab3> [Diakses: 2 April 2023].

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022c. *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (Juta rupiah), 2015-2021*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2060/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-pendapatan-juta-rupiah-2015-2019.html> [Diakses: 2 April 2023].

Chen, J., Pu, M. dan Hou, W. 2019. The trend of the Gini coefficient of China (1978-2010). *Journal of Chinese Economic and Business Studies* 17(3), hlm. 261-285. doi: 10.1080/14765284.2019.1663695.

Danawati, S., Bendesa, I.K.G. dan Made, S.U. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5(7), hlm. 2123-2160.

Diannita, I.A.T. dan Wenagama, I.W. 2022. Pengaruh Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Bali Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 11(3), hlm. 959-990.

Domonkos, T. 2020. Inequalities and Economic Growth in EU Countries. *Politická ekonomie* 68(4), hlm. 405-422. doi: 10.18267/j.polek.1284.

Fanshuri, R. dan Saputra, P.M.A. 2022. Analisis Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus Di Kabupaten Kawasan Sleingkar Wilis Periode 2010-2019). *Journal of Development Economic and Social Studies* 1(1), hlm. 148-160. doi: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.14>.

Fattah, S., Suhab, S. dan Fadillah, A.N. 2022. Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial* 1(1), hlm. 108-125.

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. 3 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D., Porter, D. dan Gunasekar, S. 2017. *Basic Econometrics*. 5 ed. New York: McGraw Hill Education.
- Hellen, H., Mintarti, S. dan Fitriadi Fitriadi. 2017. Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 13(1), hlm. 28–38.
- Ifeakachukwu, N.P. 2020. Globalisation, Economic Growth and Income Inequality in Nigeria. *Indian Journal of Human Development* 14(2), hlm. 202–212. doi: 10.1177/0973703020948484.
- Kunenengan, R.M.A., Engka, D.S.M. dan Rorong, I.P.F. 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23(3), hlm. 133–144.
- Nugraha, A.T., Prayitno, G., Situmorang, M.E. dan Nasution, A. 2020. The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics & Sociology* 13(1), hlm. 102–115. doi: 10.14254/2071-789X.2020/13-1/7.
- Palguno, M.D., Valeriani, D. dan Suhartono, S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *SOROT* 15(2), hlm. 105. doi: 10.31258/sorot.15.2.105-116.
- Rahmadi, S. dan Parmadi. 2019. Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *55 Jurnal Paradigma Ekonomika* 14(2), hlm. 55–66.
- Rori, C.F., Luntungan, A.Y. dan Niode, A.O. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2), hlm. 243–254.
- Saidi, Y., Ochi, A. dan Maktouf, S. 2023. FDI inflows, economic growth, and governance quality trilogy in developing countries: A panel VAR analysis. *Bulletin of Economic Research* 75(2), hlm. 426–449. doi: 10.1111/boer.12364.
- Samara, C.S.M., Djohan, S. dan Kurniawan, E. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 4(2). doi: <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i2.4990>.
- Sembiring, T.A. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5(1), hlm. 77–91. doi: 10.33105/itrev.v5i1.167.
- Sulistyaningrum, B.I., Bhinadi, A. dan Astuti, R.D. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *Sinomika Journal* 1(4), hlm. 891–902. doi: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>.
- The World Bank. 2015. *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta. [Online] Dari: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/870151468197336991/pdf/101668-BAHASA-WP-PUBLIC-Box394818B-Executive-Summary-Indonesias-Rising-Divide.pdf> [Diakses: 1 April 2023].
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2012. *Economic Development*. 11 ed. New York: Pearson.
- Walujadi, D., Indupurnahayu, I. dan Endri, Endri. 2022. Determinants of Income Inequality Among Provinces: Panel Data Evidence from Indonesia. *Quality - Access to Success* 23(190). doi: 10.47750/QAS/23.190.26.
- Yoertiara, R.F. dan Feriyanto, N. 2022. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, hlm. 92–100. doi: 10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9.
- Yolanda, Sari, I.P., Mulatsih, S.N. dan Massora, A. 2020. The Human Development and Poverty Alleviation based on Klassen's Typology: Case Study of East Java Province. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12(7), hlm. 477–483. doi: 10.5373/JARDCS/V12I7/20202029.
- Yumna, A., Rakhmadi, M.F., Hidayat, M.F., Gultom, S.E. dan Suryahadi, A. 2017. *Mengestimasi Dampak Ketimpangan terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indoianesia*. Jakarta. [Online] Dari: [http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/inequalityunemployment\\_ind.pdf](http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/inequalityunemployment_ind.pdf) [Diakses: 1 April 2023].
- Zusanti, R.D., Sasana, H. dan Rusmijati. 2020. Analysis Of The Effect Of HDI, Economic Growth And Our To Regional Inequality On The Island Of Java 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2(3), hlm. 602–615.